

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perekonomian suatu negara, tabungan dan investasi merupakan indikator yang dapat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang (*developing countries*) termasuk di dalamnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, memiliki dana yang cukup besar. Tetapi di sisi lain, usaha pengerahan sumber dana dalam negeri untuk membiayai pembangunan menghadapi kendala dalam pembentukan modal baik yang bersumber dari penerimaan pemerintah yaitu ekspor barang dan jasa ke luar negeri, ataupun penerimaan pemerintah melalui instrumen pajak. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 ditambah dengan krisis keuangan global tahun 2008 menjadi krisis multidimensi yang berdampak kondisi Indonesia secara umum tidak hanya terhadap sektor ekonomi saja. Nilai tukar rupiah yang terdepresiasi sangat tajam, inflasi yang tinggi, menurunnya kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia, merupakan beberapa akibat dari krisis ekonomi tersebut. Namun demikian, dengan beberapa kali perubahan struktur politik dan penerapan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah, kondisi Indonesia menunjukkan perubahan yang lebih baik dan kondisi perekonomian yang stabil.

Di Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk membiayai pembangunan yang mencakup investasi domestik, sumber dananya dapat bersumber dari tabungan dan pinjaman. Namun, karena terbatasnya

jumlah dana serta pinjaman yang diperoleh, maka diperlukan tabungan yang lebih tinggi sebagai sumber dana yang utama. Perlunya tabungan ini dibuktikan dengan adanya *saving-investment gap* yang semakin melebar dari tahun ke tahun yang menandakan bahwa pertumbuhan investasi domestik melebihi kemampuan dalam mengakumulasi tabungan.

Pada negara berkembang dan miskin, kondisi yang paling menonjol adalah belum terciptanya kondisi yang mendorong pada iklim dimana kegairahan untuk menabung dan penanaman modal menunjukkan tingkat yang menggembarakan. Sistem produksi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat masih menggunakan pola tradisional. Masih terbatasnya sektor modern dan belum berfungsinya secara efektif dan efisien institusi-institusi keuangan yang disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang masih tradisional menyebabkan pengerahan dana dari masyarakat mengalami kesulitan.

Pengerahan modal yang bersumber dari dalam negeri berasal dari 3 sumber utama, yaitu : pertama, tabungan sukarela masyarakat. Kedua, tabungan pemerintah, dan ketiga tabungan paksa (*forced saving or involuntary saving*). Sedangkan modal yang berasal dari luar negeri yaitu melalui pinjaman resmi pemerintah kepada lembaga-lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB), World Bank, maupun pinjaman resmi bilateral dan multilateral, juga melalui *foreign direct investment* (FDI).

Dengan latar belakang ditetapkannya Paket Kebijakan Oktober 1988 atau yang lebih dikenal dengan "PAKTO 88", yang pokok-pokok kebijakannya berisi antara lain untuk menggerakkan dana dari masyarakat dengan cara

memudahkan pembukaan kantor cabang baru, pendirian bank swasta baru, keleluasaan penyelenggaraan tabungan, dan perluasan kantor cabang bank. Setelah adanya "PAKTO 88" ini, semakin mudahlah bank didirikan dan semakin bervariasi juga bentuk-bentuk tabungan yang ditawarkan oleh bank-bank yang sudah terbentuk baik swasta maupun pemerintah. Semenjak saat itu, tabungan nasional mulai meningkat drastis. Dalam tahun-tahun sebelumnya tampak adanya kecenderungan persaingan antar berbagai negara untuk memperbesar arus investasi baik asing maupun domestik. Persaingan terutama terjadi karena kebutuhan dana yang sangat besar dan mendesak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi terutama di negara-negara berkembang.

Di Yogyakarta belum tercipta kondisi yang mendorong pada iklim dimana kegairahan untuk menabung. Sistem produksi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat masih menggunakan pola tradisional. Masih terbatasnya sektor modern dan belum berfungsinya secara efektif dan efisien institusi-institusi keuangan yang disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang masih tradisional menyebabkan pengerahan dana dari masyarakat mengalami kesulitan. Namun dengan landasan Paket Kebijakan Oktober 1988 atau yang lebih dikenal dengan "PAKTO 88", yang pokok-pokok kebijakannya berisi antara lain untuk mengerahkan dana dari masyarakat dengan cara memudahkan pembukaan kantor cabang baru, pendirian bank swasta baru, keleluasaan penyelenggaraan tabungan, dan perluasan kantor cabang bank. Setelah adanya "PAKTO 88" ini, semakin mudahlah bank didirikan dan semakin bervariasi juga bentuk-bentuk tabungan yang ditawarkan oleh bank-bank yang sudah terbentuk baik swasta maupun pemerintah. Semenjak saat itu, tabungan nasional

kehidupan sektor perbankan, agar tercipta suatu struktur industri perbankan yang kuat dan stabil sehingga mampu beroperasi secara sehat.

Dalam laporan tahunan Bank Indonesia 1996 – 2007 beberapa tahun terakhir terdapat sorotan yang cukup tajam terhadap perkembangan dari tingkat suku bunga dalam negeri cukup tinggi. Hal ini dianggap wajar bila dilihat dari kepentingan pengusaha yang dalam melaksanakan kegiatannya pada umumnya menggunakan dana yang berasal dari kredit perbankan. Namun disisi lain para penabung dan deposan berkepentingan dengan suku bunga simpanan yang cukup menarik. Selain untuk mempertahankan daya beli dari uang yang disimpan, suku bunga menurut kacamata penabung dan deposan harus cukup menarik bila dibandingkan dengan alternatif penanaman dana lainnya.

Dengan demikian, dalam sistem perekonomian di Indonesia sejak bulan Juni 1983. Sumber dana yang terjadi pada dasarnya merupakan refleksi dari kekuatan permintaan dan penawaran dana dari masyarakat. Selain itu perlu dikekemukakan bahwa Indonesia masih mengalami kesenjangan antara ketersediaan tabungan masyarakat dan kebutuhan investasi (*Investasi Saving Gap*) yang bersifat struktural yang tercermin dari perkembangan transaksi berjalan yang umumnya mengalami defisit. Untuk menutup defisit transaksi berjalan tersebut, dalam kurun waktu 25 tahun terakhir Indonesia harus hutang untuk modal tambahan dana dari luar negeri. Dalam kondisi seperti ini, dana merupakan komoditas yang cukup langka dan harganya atau suku bunga sebenarnya refleksi dari kelangkaan dana (*Scarcity of Capital*) tersebut.

mulai meningkat drastis. Dalam tahun-tahun sebelumnya tampak adanya kecenderungan persaingan antar berbagai negara untuk memperbesar arus investasi baik asing maupun domestik

Dalam sistem perekonomian saat ini lembaga keuangan di samping memiliki peran yang sangat penting dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan, juga merupakan suatu jaringan *financial market* (institusi, sektor usaha dan rumah tangga) dimana pemerintah disamping merupakan pelaku juga sekaligus memiliki wewenang untuk mengatur operasi sistem keuangan tersebut. Pada dasarnya fungsi utama sistem keuangan adalah menstransfer dana-dana (*loanable funds*) dari penabung kepada peminjam. Dana-dana tersebut dialokasikan melalui negosiasi dan perdagangan dalam pasar uang yang mempertemukan individu dan sektor usaha sebagai pemilik dana dengan pihak pemakai dana.

Pesatnya perkembangan di sektor lembaga keuangan sebagai konsekuensinya perlu dilihat sejauh mana kesiapan dan antisipasi masyarakat, terutama masyarakat yang menggunakan jasa keuangan termasuk komoditas sektor itu sendiri dan lingkungan akademis dalam menghadapi tantangan globalisasi di masa akan datang yang tentu saja akan semakin kompleks dan kompetitif. Dengan semakin berkembangnya perekonomian masyarakat dalam suatu negara, maka perlu peningkatan aktivitas perbankan yang diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian suatu masyarakat. Di samping itu dengan adanya hubungan antara perkembangan perekonomian suatu masyarakat dengan sektor perbankan, maka pihak pemerintah selaku otoritas moneter suatu negara berkepentingan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap

Perkembangan dan tingkat suku bunga dalam negeri dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari luar negeri, seperti tingkat suku bunga internasional maupun yang berasal dari dalam negeri, sebagai ekspektasi inflasi, kondisi perbankan, serta langkah dan tindakan otoritas moneter. Bagi otoritas moneter, perkembangan dan tingkat suku bunga juga merupakan salah satu indikator moneter yang sangat penting. Bank Indonesia selalu berupaya agar suku bunga berada tingkat yang wajar. Disatu sisi perkembangan suku bunga harus merefleksikan faktor-faktor fundamental yang disebutkan terdahulu dan sisi lain suku bunga diupayakan dapat menunjang pencapaian sasaran-sasaran ekonomi makro yang ditetapkan pemerintah.

Saat ini SBI merupakan alat utama yang digunakan BI untuk mengatur jumlah uang melalui *open market operation* dengan penerbitan SBI yang dilaksanakan sejak 1 Februari 1984. Sebenarnya instrumen ini (SBI) pernah dikeluarkan pada bulan April 1970. Pada waktu itu SBI digunakan untuk mendorong beberapa bank untuk mengeluarkan deposito sejak tahun 1971. Dengan dikeluarkannya sertifikat deposito tersebut maka pengeluaran SBI dihentikan, dan diterbitkan lagi mulai 1 Februari 1984. Penggunaan SBI tersebut didasarkan pada teori permintaan dan penawaran. Dengan mahalnya rupiah maka diharapkan orang akan berbondong-bondong lari ke rupiah. Suku bunga yang tinggi tentu akan menarik orang untuk menginvestasikan dalam bentuk rupiah. Pada tahun 2001 tingkat suku bunga sebesar 14,23%, yang tadinya tahun 2000 sebesar 16,15%.

Dengan tingginya SBI, diharapkan rupiah dapat tertarik ke BI sehingga akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. *Open market operation* (melalui tingkat bunga SBI) merupakan operasi moneter Bank Sentral yang amat populer dan berkaitan erat dengan pengaturan jumlah uang yang beredar, khususnya total uang (M_1) yaitu uang kartal dan uang giral/*currency* dan *demand deposits* (Muhardarsyah Sinungan, 1984)

Perkembangan industri perbankan di Indonesia sangatlah mencolok setelah adanya Pakto 27 tahun 1988, di mana sampai dengan bulan Desember 1999 khususnya wilayah DIY telah berdiri 187 bank, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bank Umum Devisa : 36 bank
2. Bank Umum Non Devisa : 15 bank
3. Bank Perkreditan Rakyat : 136 bank

Dengan jumlah jaringan operasional kantor mencapai 2.111 buah, kantor yang tersebar di wilayah DIY. (Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah Jawa Tengah, Desember 1999). Total dana masyarakat yang dapat dihimpun perbankan wilayah DIY per Desember 1999 sebesar Rp. 28.813 milyar, pinjaman yang disalurkan sebesar Rp. 11. 292 milyar dan total aktiva dapat mencapai Rp. 33. 835 milyar. Dengan adanya pakto 27 tahun 1988 tersebut mendorong bank-bank memunculkan produk-produk terbarunya dengan beberapa atribut

anatar lain: memberikan hadiah, banyak fasilitas kemudahan lainnya.

Dengan adanya perubahan tersebut menyebabkan:

1. Persaingan di dalam pemasaran produk;
2. Perang harga (suku bunga) yang tajam;
3. Tingkat suku bunga kredit yang bersaing.

Struktur perbankan yang kuat juga dibangun dengan meningkatkan partisipasi bank perkreditan rakyat (BPR). Struktur perbankan perlu didukung BPR yang kuat sehingga bank tersebut mampu melayani lapisan masyarakat di pedesaan yang tidak terjamah bank umum. Untuk itu, daya saing BPR akan terus ditingkatkan dengan memberikan kemudahan pembukaan kantor cabang sehingga mampu bersaing dengan bank umum yang memiliki cabang-cabang di wilayah pedesaan seperti BRI Unit Desa. Untuk memperkuat daya saing BPR, maka perlu ditingkatkan efisiensi kegiatan operasional usahanya dengan menjalin kerja sama dengan BPR lain untuk menggunakan fasilitas *back office* secara bersama-sama. Dengan adanya faktor tersebut di atas, maka industri perbankan di Indonesia khususnya di Wilayah Yogyakarta berada pada pasar yang cukup kompetitif.

B. Perumusan Masalah

Kegiatan ekonomi sangat erat hubungannya dengan perubahan-perubahan dalam investasi dan menabung. Semakin tinggi kesempatan kerja, maka pendapatan perkapita akan semakin meningkat, sehingga

semakin besar dana masyarakat yang dapat ditabung. Dari berbagai keadaan tersebut maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “Apakah faktor-faktor seperti suku bunga SBI, inflasi, produk domestik regional bruto, serta jumlah penduduk usia kerja berpengaruh terhadap pengumpulan dana masyarakat pada bank BPR di Yogyakarta?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah: untuk menganalisis apakah faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini yaitu suku bunga SBI, inflasi, produk domestik regional bruto, serta jumlah penduduk usia kerja berpengaruh terhadap pengumpulan dana masyarakat pada bank BPR di Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberi bahan masukan pada pihak bank atau pemerintah daerah dalam membuat kebijaksanaan pembangunan utamanya yang berkaitan dengan peningkatan tabungan dana masyarakat untuk mendukung pembangunan ekonomi.

2. Memberi pengetahuan kepada lingkungan akademis dan peneliti lain mengenai peluang kesempatan kerja dilihat dari faktor-faktor pertumbuhan ekonomi dalam hal ini suku bunga SBI, inflasi, produk domestik regional bruto, serta jumlah penduduk usia kerja.

